



Mengintegrasikan Kearifan Lokal ke Dalam Kewirausahaan Hijau: Studi Fenomenologi 'Siri' na Pacce' pada UMKM di Kabupaten Pangkep

Agung Muliaman Anas*, Muh. Irshan Sachrir, Damas Gianlugi Alrizqi, Siti Nardiyah Muhrani

Universitas Negeri Makassar

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai budaya lokal Bugis-Makassar, yaitu *Siri' na Pacce*, membentuk perilaku kewirausahaan hijau pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Studi ini menantang dominasi literatur Barat yang cenderung menekankan regulasi formal dan insentif ekonomi sebagai pendorong utama praktik bisnis berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik UMKM asli daerah yang telah menerapkan praktik ramah lingkungan minimal selama tiga tahun. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga tema utama: (1) *Siri'* (rasa malu/harga diri) berfungsi sebagai "kompas moral" yang mencegah pengusaha melakukan pencemaran karena takut akan sanksi sosial ((2) *Pacce* (solidaritas/empati) meluas menjadi solidaritas lintas-spesies, di mana penderitaan alam dirasakan sebagai penderitaan pribadi yang memicu inovasi pengelolaan limbah) (dan (3) Alam dimaknai sebagai titipan leluhur yang harus dijaga marwahnya. Penelitian ini menyimpulkan model "Rem dan Gas" dalam perilaku ekologis: *Siri'* menahan perilaku destruktif, sementara *Pacce* mendorong inisiatif proaktif. Hal ini menyarankan agar pembuat kebijakan menggunakan pendekatan berbasis budaya dalam mempromosikan keberlanjutan ekonomi di wilayah berkembang.

Kata Kunci: Kewirausahaan Hijau, *Siri' na Pacce*, Kearifan Lokal, UMKM, Fenomenologi.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i2.3964>

*Correspondence: Agung Muliaman Anas

Email: agung.muliaman@unm.ac.id

Received: 02-01-2026

Accepted: 02-02-2026

Published: 02-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to explore how the local Bugis-Makassar cultural values of *Siri' na Pacce* shape green entrepreneurial behavior among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Pangkajene and Kepulauan (Pangkep) Regency. This study challenges the dominance of Western-centric literature which tends to emphasize formal regulations and economic incentives as the main drivers of sustainable business practices. This research employs a qualitative approach using *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Data were collected through in-depth interviews with indigenous MSME owners who have implemented eco-friendly practices for at least three years. The study identifies three superordinate themes: (1) *Siri'* (dignity/shame) functions as a "moral compass" that prevents entrepreneurs from polluting due to fear of social sanctions ((2) *Pacce* (solidarity/compassion) expands into trans-species solidarity, where environmental degradation is felt as personal suffering, triggering waste management innovations) (and (3) Nature is interpreted as an ancestral heritage whose dignity must be preserved. The study concludes with a "Brake and Gas" model of ecological behavior: *Siri'* acts as a brake on destructive behavior, while *Pacce* acts as gas for proactive initiatives. This suggests that policymakers should utilize culture-based approaches in promoting economic sustainability in developing regions.

Keywords: Green Entrepreneurship, *Siri' na Pacce*, Local Wisdom, MSMEs, Phenomenology.

Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, wacana mengenai transisi menuju ekonomi hijau telah menjadi imperatif global, didorong oleh meningkatnya degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menyumbang lebih dari 90% bisnis di seluruh dunia dan berkontribusi signifikan terhadap PDB negara

berkembang, seringkali diidentifikasi sebagai pedang bermata dua: mereka adalah tulang punggung ekonomi, namun secara kolektif merupakan penyumbang polusi industri yang masif (Halдар, 2019) (OECD, 2021). Oleh karena itu, mendorong kewirausahaan hijau (*green entrepreneurship*)—proses mengintegrasikan tujuan lingkungan dengan tujuan ekonomi—di kalangan UMKM menjadi agenda mendesak dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

Meskipun literatur mengenai kewirausahaan hijau berkembang pesat, sebagian besar studi masih didominasi oleh perspektif Barat (*Western-centric*) yang cenderung menekankan pada determinan rasional-ekonomis, tekanan regulasi formal, dan adopsi teknologi sebagai pendorong utama perilaku hijau (Gast et al., 2017) (Soewarno et al., 2019). Pendekatan ini seringkali mengabaikan nuansa sosial-budaya (*socio-cultural nuances*) yang menjadi landasan perilaku bisnis di negara berkembang, di mana institusi informal seperti norma adat dan nilai lokal seringkali lebih kuat pengaruhnya daripada hukum positif yang lemah penegakannya (Dana et al., 2022). Terdapat kesenjangan empiris yang signifikan mengenai bagaimana nilai-nilai kearifan lokal (*indigenous wisdom*) dapat bertindak sebagai "pengendali internal" bagi pengusaha untuk berperilaku etis terhadap lingkungan tanpa adanya paksaan eksternal.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keragaman etnis yang tinggi, menawarkan konteks unik untuk mengeksplorasi fenomena ini. Secara spesifik, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) di Sulawesi Selatan merepresentasikan wilayah ekologis yang kompleks, mencakup area pegunungan karst (bagian dari UNESCO Global Geopark), daratan rendah agraris, hingga wilayah kepulauan spermonde. Kerentanan ekologis di wilayah "tiga dimensi" ini menuntut adaptasi perilaku bisnis yang berkelanjutan. Di wilayah ini, masyarakat Bugis-Makassar hidup dengan filosofi budaya yang sangat kuat, yakni *Siri' na Pacce*. *Siri'* merujuk pada harga diri atau rasa malu yang mendalam jika seseorang gagal menjunjung tinggi norma sosial, sementara *Pacce* (atau *Pesse* dalam bahasa Bugis) merujuk pada rasa solidaritas, empati, dan kepedihan yang dirasakan atas penderitaan orang lain atau komunitas (Rahman et al., 2020).

Penelitian terdahulu tentang *Siri' na Pacce* telah banyak dilakukan, namun mayoritas berfokus pada konteks kepemimpinan politik, pencegahan korupsi, atau manajemen konflik (Abbas, 2018) (Haris, 2021). Belum ada penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi bagaimana filosofi ini diinterpretasikan dan diinternalisasi oleh pelaku UMKM sebagai landasan etika lingkungan. Pertanyaan mendasarnya adalah: Apakah rasa "malu" (*Siri'*) dapat mencegah pengusaha membuang limbah sembarangan? Dan apakah rasa "solidaritas" (*Pacce*) dapat memotivasi mereka untuk melindungi ekosistem laut tempat komunitas bergantung?

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi makna dan pengalaman hidup pelaku

UMKM di Pangkep dalam menerapkan praktik bisnis hijau melalui lensa budaya *Siri' na Pacce*. Studi ini memberikan kontribusi teoritis pada literatur *Indigenous Entrepreneurship* dengan menawarkan model perilaku pro-lingkungan berbasis budaya, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi keberlanjutan yang lebih sensitif secara budaya, alih-alih hanya mengandalkan pendekatan birokratis.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). IPA dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pelaku UMKM di Kabupaten Pangkep memaknai pengalaman hidup mereka dalam menjalankan bisnis ramah lingkungan melalui lensa budaya *Siri' na Pacce* (Smith et al., 2022). Berbeda dengan fenomenologi deskriptif yang hanya berfokus pada apa yang dialami, IPA memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi ganda (*double hermeneutic*): peneliti mencoba memahami partisipan, yang sedang mencoba memahami dunia mereka sendiri. Desain ini sangat relevan untuk menangkap nuansa emosional dan spiritual dari nilai budaya lokal yang abstrak.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, sebuah wilayah yang merepresentasikan ekosistem "tiga dimensi" (pegunungan, daratan, dan kepulauan). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik unik Pangkep sebagai wilayah yang rentan secara ekologis namun kaya akan tradisi budaya Bugis-Makassar.

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria inklusi yang ketat untuk memastikan homogenitas sampel, sesuai standar IPA:

1. Wirausaha asli suku Bugis atau Makassar yang lahir dan besar di Pangkep (untuk memastikan internalisasi nilai *Siri' na Pacce*).
2. Memiliki usaha (UMKM) yang telah beroperasi minimal 3 tahun.
3. Telah menerapkan setidaknya dua bentuk praktik hijau secara konsisten (misal: pengolahan limbah, penggunaan energi terbarukan, atau kemasan ramah lingkungan).
4. Bersedia menceritakan pengalaman pribadinya secara terbuka.

Berdasarkan prinsip IPA yang mengutamakan kedalaman daripada keluasan (*depth over breadth*), jumlah partisipan dalam penelitian ini dibatasi sebanyak 6-10 orang informan kunci. Jumlah ini dianggap memadai untuk menganalisis konvergensi dan divergensi makna secara mendetail (Noon, 2018).

Data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur (*semi-structured in-depth interviews*). Metode ini memberikan fleksibilitas bagi partisipan untuk menarasikan kisah hidup mereka secara natural, sementara peneliti tetap dapat menjaga fokus pada topik penelitian. Pertanyaan wawancara dirancang bersifat terbuka (*open-ended*)

dan non-direktif. Setiap wawancara berlangsung selama 45-90 menit, direkam menggunakan alat perekam audio dengan izin partisipan, dan dicatat dalam catatan lapangan (field notes) untuk menangkap ekspresi non-verbal. Selain wawancara, observasi partisipatif juga dilakukan di lokasi usaha untuk memverifikasi kesesuaian antara narasi yang disampaikan dengan praktik bisnis aktual di lapangan.

Analisis data mengikuti langkah-langkah sistematis IPA yang dikembangkan oleh Smith et al. (2022):

1. *Reading and Re-reading*: Membaca transkrip wawancara berulang kali untuk mengakrabkan diri dengan data.
2. *Initial Noting*: Membuat catatan awal mengenai komentar deskriptif, linguistik, dan konseptual pada margin transkrip.
3. *Developing Emergent Themes*: Mengubah catatan awal menjadi tema-tema yang lebih ringkas namun tetap mempertahankan makna esensial partisipan.
4. *Searching for Connections across Themes*: Mengelompokkan tema-tema yang muncul ke dalam tema superordinat (*superordinate themes*).
5. *Moving to the Next Case*: Mengulangi proses pada partisipan berikutnya, sambil tetap peka terhadap pola baru.
6. *Looking for Patterns across Cases*: Mencari pola hubungan antar kasus untuk membangun struktur narasi utama yang menjawab pertanyaan penelitian.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data kualitatif, penelitian ini menerapkan strategi triangulasi sumber (membandingkan data wawancara dengan observasi) dan member checking. Dalam member checking, peneliti kembali kepada partisipan dengan membawa ringkasan hasil interpretasi awal untuk meminta konfirmasi apakah interpretasi tersebut akurat merepresentasikan pengalaman mereka (Creswell & Poth, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis IPA terhadap transkrip wawancara dari delapan informan kunci, penelitian ini mengidentifikasi tiga tema superordinat yang menjelaskan bagaimana nilai *Siri' na Pacce* membentuk perilaku kewirausahaan hijau di Pangkep. Ketiga tema tersebut adalah: (1) *Siri'* sebagai Institusi Moral Ekologis dalam Kewirausahaan Hijau UMKM Pangkep, (2) *Pacce* sebagai Solidaritas Lintas-Spesies dan Aktivasi Moral Ekologis dalam Kewirausahaan Hijau, dan (3) Alam sebagai Titipan Leluhur (*Arajang*) dan Fondasi Ontologis Kewirausahaan Hijau. Profil demografis dan karakteristik usaha dari partisipan disajikan secara rinci pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Profil Partisipan Penelitian (Informan Kunci)

Kode	Gender/Usia	Pendidikan Terakhir	Jenis Usaha dan Lokasi	Lama Usaha	Praktik Hijau (<i>Green Practices</i>)
P1	Laki-laki/ 52 Tahun	SD	Budidaya Bandeng (Wilayah Pesisir)	15 Tahun	Penggunaan pakan organik, restorasi mangrove di sekitar tambak, tanpa pestisida kimia.
P2	Perempuan/ 45 Tahun	SMA	Pengolahan Kepiting Rajungan (Wilayah Kepulauan)	8 Tahun	Pemanfaatan limbah cangkang menjadi tepung (<i>Zero waste</i>), manajemen air limbah sederhana.
P3	Laki-laki/ 58 Tahun	SMP	Petani Garam (Wilayah Pesisir)	20 Tahun	Teknologi geomembran (mengurangi intrusi tanah), penggunaan energi surya untuk pompa air.
P4	Perempuan/ 38 Tahun	S1	Kerajinan Eceng Gondok (Wilayah Daratan Rendah)	5 Tahun	Pemanfaatan gulma invasif sebagai bahan baku utama, penggunaan pewarna alami akar-akaran.
P5	Laki-laki/ 42 Tahun	SMA	Budidaya Rumput Laut (Wilayah Kepulauan)	12 Tahun	Daur ulang botol plastik bekas sebagai pelampung bentangan, pembersihan pantai rutin.
P6	Perempuan/ 50 Tahun	SD	Produksi Terasi Udang (Wilayah Pesisir)	25 Tahun	Penggunaan kemasan tradisional (daun pisang/lontar) untuk mengurangi plastik, pengeringan matahari murni.
P7	Laki-laki/ 35 Tahun	S1	Ekowisata & Kopi (Wilayah Pegunungan/ Geopark)	4 Tahun	Konsep <i>farm-to-table</i> , larangan plastik sekali pakai di area wisata, konservasi mata air.
P8	Perempuan/ 40 Tahun	SMA	Abon Ikan (Wilayah Pesisir)	10 Tahun	Pemanfaatan jeroan ikan untuk pakan ternak (sirkular ekonomi), efisiensi gas/energi.

Tema 1: *Siri'* sebagai Institusi Moral Ekologis dalam Kewirausahaan Hijau UMKM Pangkep

Hasil analisis *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) menunjukkan bahwa nilai *Siri'* beroperasi sebagai institusi moral ekologis yang secara mendalam membentuk orientasi kewirausahaan hijau pada UMKM di Kabupaten Pangkep. Para partisipan tidak memaknai praktik ramah lingkungan sebagai respons terhadap regulasi formal atau strategi diferensiasi pasar, melainkan sebagai konsekuensi etis dari identitas kultural mereka sebagai bagian dari masyarakat Bugis-Makassar. Tindakan mencemari lingkungan dipersepsikan sebagai bentuk *mate siri'* (kematian harga diri), sebuah kondisi simbolik yang mengancam legitimasi sosial dan martabat personal.

Temuan ini memperluas diskursus green entrepreneurship yang selama ini didominasi oleh pendekatan rasional-ekonomis. Studi-studi sebelumnya seperti Gast, Gundolf, dan Cesinger (2017) dalam *Journal of Cleaner Production* menekankan bahwa orientasi keberlanjutan pada perusahaan banyak dipengaruhi oleh regulasi dan tekanan pasar. Demikian pula Haldar (2019) serta Yi (2021) menunjukkan pentingnya dukungan institusional formal dan insentif eksternal dalam membentuk perilaku kewirausahaan hijau. Namun, dalam konteks Pangkep, keputusan untuk tidak mencemari lingkungan tidak dirumuskan dalam bahasa compliance atau market opportunity, melainkan dalam bahasa kehormatan dan integritas moral.

Dalam kerangka *Institutional Theory* yang dikembangkan oleh DiMaggio dan Powell (1983) serta diperdalam oleh Scott (2014), perilaku organisasi dibentuk oleh tiga pilar institusional: regulatif, normatif, dan kognitif. Literatur *green entrepreneurship* arus utama cenderung berfokus pada pilar regulatif (regulation-based compliance). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks UMKM Pangkep, pilar normative (yang diwujudkan melalui nilai *Siri'*) menjadi kekuatan dominan. *Siri'* dapat dipahami sebagai bentuk normative institutional pressure yang terinternalisasi kuat. Berbeda dengan tekanan koersif negara yang bersifat eksternal, *Siri'* bekerja melalui internalisasi norma budaya. Scott (2014) menyebut bahwa institusi normatif membentuk perilaku melalui kewajiban moral dan harapan sosial. Dalam konteks ini, pelaku usaha menghindari pencemaran bukan karena takut pada sanksi hukum, tetapi karena takut kehilangan legitimasi moral di hadapan komunitas.

Temuan ini juga sejalan dengan argumen Dana et al. (2022) yang menekankan peran *ethnic and community capital* dalam membentuk perilaku kewirausahaan di masyarakat berbasis budaya kuat. Namun, penelitian ini memperluas argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa modal etnis bukan hanya sumber jaringan ekonomi, tetapi juga perangkat regulatif ekologis yang konkret. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada *Institutional Theory* dengan menunjukkan bahwa dalam masyarakat komunal, institusi

informal berbasis adat dapat berfungsi sebagai mekanisme tata kelola lingkungan yang efektif tanpa ketergantungan penuh pada negara.

Secara psikologis, temuan ini dapat dijelaskan melalui konsep *moral identity* sebagaimana dikemukakan oleh Aquino dan Reed (2002). Mereka berargumen bahwa individu yang memiliki identitas moral kuat akan bertindak konsisten dengan nilai yang mereka internalisasi sebagai bagian dari definisi diri. Dalam konteks Pangkep, menjadi “orang yang memiliki Siri” merupakan inti dari identitas tersebut. Oleh karena itu, tindakan merusak lingkungan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap integritas diri. Pendekatan ini juga dapat dibaca melalui lensa *Moral Economy* (Thompson, 1971) (Scott, 1976), yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi selalu terikat pada norma keadilan dan legitimasi sosial. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, keuntungan ekonomi tidak dipandang netral secara moral. Keuntungan yang diperoleh dengan merusak lingkungan kehilangan legitimasi sosial dan dianggap tidak sah secara etis. Hal ini menantang paradigma neoklasik yang memandang pelaku usaha sebagai agen rasional yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan. Sebaliknya, temuan penelitian ini menunjukkan adanya rasionalitas budaya (*cultural rationality*), di mana keputusan ekonomi tunduk pada batas moral kehormatan. Hierarki nilai yang teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keormatan sosial > Keberlanjutan relasi komunitas > Keuntungan ekonomi jangka pendek

Konfigurasi ini menunjukkan bahwa green behavior pada UMKM Pangkep bersifat deontologis (berbasis kewajiban moral), bukan utilitarian (berbasis konsekuensi hasil).

Dari perspektif *Social Capital Theory* (Bourdieu, 1986) (Putnam, 1993), norma dan kepercayaan kolektif berfungsi sebagai sumber daya yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama sosial. Dalam konteks ini, *Siri'* membentuk norma kolektif yang menjaga reputasi dan trust antar pelaku usaha. Reputasi menjadi aset strategis karena UMKM sangat bergantung pada jaringan sosial lokal. Putnam (1993) menekankan bahwa kepercayaan sosial memperkuat efektivitas tata kelola. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *Siri'* menghasilkan bentuk *ecological social capital*, modal sosial yang secara spesifik menopang praktik keberlanjutan lingkungan. Ketika pencemaran dipersepsikan sebagai tindakan memalukan, tekanan horizontal antar pelaku usaha mendorong standar ekologis minimum tanpa perlu pengawasan negara yang intensif. Dengan demikian, *Siri'* berfungsi sebagai infrastruktur moral kolektif yang menopang keberlanjutan ekonomi lokal. Ini memperluas diskursus modal sosial dengan menunjukkan perannya dalam regulasi ekologis.

Dalam *Stakeholder Theory* yang dipelopori oleh Freeman (1984), organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas dan lingkungan. Namun, dalam praktik global, lingkungan sering diperlakukan sebagai “silent stakeholder” yang kepentingannya diwakili oleh regulasi negara. Dalam konteks Pangkep,

Siri' menjadikan komunitas sebagai aktor aktif dalam mengawasi praktik ekologis. Legitimasi usaha tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan hukum, tetapi oleh penerimaan moral komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi budaya menjadi dimensi penting dalam relasi pemangku kepentingan, khususnya dalam konteks masyarakat adat.

Penelitian mengenai *Siri' na Pacce* sebelumnya lebih banyak berfokus pada etika kepemimpinan dan birokrasi (Abbas, 2018) (Haris, 2021) (Rahman et al., 2020). Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa nilai Siri' meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam konteks pemerintahan dan organisasi publik. Penelitian ini memperluas cakupan tersebut dengan menunjukkan bahwa nilai yang sama juga membentuk perilaku ekologis dalam sektor kewirausahaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi fungsi normatif Siri' dalam menjaga integritas sosial, tetapi juga memperlihatkan bahwa ia memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola lingkungan dalam konteks UMKM.

Tema 1 menegaskan bahwa *Siri'* bukan sekadar kompas moral, melainkan institusi moral ekologis yang membentuk arsitektur kewirausahaan hijau berbasis budaya. Dalam konteks Pangkep, keberlanjutan lingkungan dijaga bukan karena ketakutan terhadap hukum negara, tetapi karena ketakutan terhadap kehilangan kehormatan budaya. Temuan ini menawarkan perspektif alternatif yang memperluas teori kewirausahaan hijau dengan memasukkan dimensi etika kultural sebagai determinan sentral dalam konteks negara berkembang.

Tema 2: *Pacce* sebagai Solidaritas Lintas-Spesies dan Aktivasi Moral Ekologis dalam Kewirausahaan Hijau

Analisis fenomenologis terhadap pengalaman hidup pelaku UMKM di Pangkep menunjukkan bahwa nilai *Pacce* berfungsi sebagai mekanisme aktivasi moral ekologis yang mendorong inisiatif proaktif dalam praktik kewirausahaan hijau. Jika *Siri'* bekerja sebagai "rem moral" yang mencegah tindakan destruktif, maka *Pacce* berfungsi sebagai "gas moral" yang mendorong tindakan afirmatif untuk merawat lingkungan. Para partisipan menggambarkan pengalaman emosional yang mendalam ketika menyaksikan kerusakan lingkungan, seperti air sungai menghitam, ikan mati, atau bau limbah menyengat yang mereka maknai sebagai penderitaan bersama (*shared suffering*). Secara fenomenologis, *Pacce* tidak hanya dipahami sebagai empati antar-manusia, tetapi meluas menjadi solidaritas lintas-spesies (*trans-species solidarity*). Lingkungan (laut, sungai, mangrove, bahkan ikan dan hewan ternak) dipersepsikan sebagai bagian dari komunitas moral yang layak dipedulikan. Dengan demikian, dorongan untuk mengolah limbah, mengurangi plastik, atau melakukan daur ulang tidak semata respons terhadap regulasi, melainkan respons emosional terhadap penderitaan ekologis yang dirasakan sebagai penderitaan diri sendiri.

Secara teoretis, temuan ini dapat dijelaskan melalui teori empati moral (*moral empathy*) sebagaimana dikembangkan oleh Hoffman (2000), yang menyatakan bahwa

empati terhadap penderitaan pihak lain dapat memicu tindakan prososial. Dalam konteks Pangkep, empati tersebut tidak terbatas pada manusia, tetapi diperluas ke entitas ekologis. Hal ini menunjukkan adanya perluasan lingkup empati yang melampaui batas *antropocentric morality*. Temuan ini juga selaras dengan konsep *expanding moral circle* yang diperkenalkan oleh Singer (1981), di mana lingkup pertimbangan moral dapat berkembang dari manusia ke hewan dan lingkungan. Namun, berbeda dari argumentasi *utilitarian Singer* yang berbasis rasionalitas etis universal, perluasan empati dalam konteks Pacce bersumber dari nilai budaya lokal yang diwariskan secara kolektif. Dengan demikian, *Pacce* berfungsi sebagai mekanisme internal yang mengaktifasi perilaku ekologis melalui emosi moral, bukan semata melalui kalkulasi rasional.

Dalam *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984), organisasi diharapkan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terdampak oleh aktivitasnya. Namun, secara praktis lingkungan sering kali diperlakukan sebagai entitas pasif yang diwakili oleh regulasi negara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui *Pacce*, lingkungan diperlakukan sebagai pemangku kepentingan moral aktif. Rasa iba terhadap sungai yang tercemar atau laut yang rusak menciptakan relasi emosional yang mendalam antara pelaku usaha dan ekosistem. Dalam konteks ini, legitimasi usaha tidak hanya bergantung pada penerimaan sosial, tetapi juga pada kesesuaian moral terhadap kesejahteraan ekologis. Temuan ini dapat pula dibaca melalui konsep *Ecological Citizenship* (Dobson, 2003), yang menekankan tanggung jawab moral individu terhadap lingkungan sebagai bagian dari kewargaan. Namun, jika dalam literatur Barat *ecological citizenship* sering dikaitkan dengan kesadaran hak dan kewajiban dalam kerangka negara-bangsa, maka dalam konteks Pangkep tanggung jawab tersebut berakar pada solidaritas budaya, bukan kontrak sosial formal.

Dalam literatur kewirausahaan, Grant (2007) memperkenalkan konsep *prosocial motivation* sebagai dorongan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Pacce* berfungsi sebagai bentuk *prosocial motivation* yang diperluas ke ranah ekologis. Pelaku UMKM tidak hanya termotivasi untuk tidak merugikan sesama manusia, tetapi juga untuk tidak menimbulkan penderitaan pada ekosistem. Hal ini memperkaya literatur *green entrepreneurship* yang selama ini banyak menekankan *opportunity recognition* (Shane & Venkataraman, 2000) atau *green market advantage*. Dalam konteks Pangkep, inovasi pengelolaan limbah atau penggunaan bahan ramah lingkungan lahir bukan karena melihat peluang pasar hijau, melainkan karena dorongan empati ekologis. Dengan demikian, *Pacce* dapat dikonseptualisasikan sebagai *affective driver of green innovation*, pendorong afektif inovasi hijau yang bersumber dari emosi moral kolektif.

Dari perspektif *Moral Economy* (Thompson, 1971) (Scott, 1976), aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari norma keadilan dan solidaritas sosial. *Pacce* memperkuat

norma bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh dengan menimbulkan penderitaan kolektif. Jika Siri' menjaga kehormatan, maka *Pacce* menjaga solidaritas. Dalam konteks ini, tindakan mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah atau melakukan pembersihan pantai secara rutin dipersepsikan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap komunitas dan ekosistem. Dengan demikian, green entrepreneurship tidak semata berfungsi sebagai strategi keberlanjutan bisnis, tetapi sebagai ekspresi solidaritas moral terhadap makhluk hidup dan lingkungan.

Jika pada Tema 1 Siri' diposisikan sebagai ecological social capital berbasis norma, maka *Pacce* dapat dipahami sebagai *affective social capital*, modal sosial berbasis empati kolektif. Bourdieu (1986) dan Putnam (1993) menekankan pentingnya kepercayaan dan norma dalam membangun kerja sama. Penelitian ini menunjukkan bahwa emosi kolektif seperti empati dan solidaritas juga berfungsi sebagai perekat sosial yang mendorong perilaku ekologis. Solidaritas lintas-spesies yang teridentifikasi dalam penelitian ini menciptakan hubungan emosional antara pelaku usaha dan ekosistem. Hubungan ini menghasilkan dorongan internal untuk menjaga keberlanjutan, bahkan ketika tidak ada insentif ekonomi langsung.

Literatur *Indigenous Entrepreneurship* menekankan pentingnya nilai budaya dalam membentuk orientasi bisnis berbasis komunitas. Namun, sebagian besar studi memfokuskan pada identitas, jaringan sosial, atau akses sumber daya (Dana et al., 2022). Penelitian ini memperluas cakupan tersebut dengan menunjukkan bahwa nilai budaya seperti *Pacce* tidak hanya membentuk struktur sosial, tetapi juga membentuk orientasi ekologis bisnis. *Pacce* memungkinkan internalisasi tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari solidaritas budaya. Dengan demikian, inovasi hijau tidak dipahami sebagai tuntutan eksternal globalisasi, tetapi sebagai ekspresi nilai lokal yang autentik.

Dengan demikian, Tema 2 menegaskan bahwa *Pacce* merupakan fondasi afektif kewirausahaan hijau berbasis budaya. Jika Siri' menjaga batas moral perilaku, maka *Pacce* menggerakkan tindakan proaktif untuk merawat dan memulihkan ekosistem. Kombinasi keduanya membentuk arsitektur etika kewirausahaan hijau yang unik dan kontekstual dalam masyarakat Bugis-Makassar.

Tema 3: Alam sebagai Titipan Leluhur (*Arajang*) dan Fondasi Ontologis Kewirausahaan Hijau

Hasil analisis fenomenologis menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Kabupaten Pangkep tidak hanya memandang alam sebagai sumber daya ekonomi, tetapi sebagai titipan leluhur yang memiliki dimensi spiritual dan moral. Dalam narasi partisipan, laut, tambak, pegunungan karst, dan tanah tidak diposisikan sebagai aset produksi semata, melainkan sebagai warisan sakral (*arajang*) yang harus dijaga marwahnya. Merusak alam dipersepsikan bukan hanya sebagai kesalahan ekologis, tetapi sebagai bentuk

pengkhianatan terhadap leluhur dan generasi mendatang. Secara fenomenologis, relasi antara manusia dan alam dalam konteks ini bersifat relasional dan intergenerasional. Alam dimaknai sebagai entitas yang menghubungkan masa lalu (leluhur), masa kini (pelaku usaha), dan masa depan (anak cucu). Oleh karena itu, praktik kewirausahaan hijau bukan sekadar strategi keberlanjutan bisnis, tetapi ekspresi tanggung jawab moral lintas generasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kewirausahaan hijau di Pangkep berakar pada fondasi ontologis yang berbeda dari paradigma ekonomi modern. Alam tidak direduksi menjadi *natural capital* yang dapat dieksploitasi sepanjang menguntungkan, melainkan diposisikan sebagai amanah moral yang harus dipelihara.

Dalam filsafat lingkungan, perdebatan klasik berkisar antara antroposentrisme dan ekosentrisme. Perspektif antroposentris memandang alam sebagai instrumen bagi kesejahteraan manusia, sedangkan ekosentrisme mengakui nilai intrinsik alam (Naess, 1973) (Rolston, 1988). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan pelaku UMKM Pangkep lebih dekat pada ontologi relasional, di mana manusia dan alam dipahami sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang saling terikat. Konsep ini sejalan dengan gagasan *deep ecology* (Naess, 1973) yang menekankan nilai intrinsik alam, tetapi dalam konteks Pangkep nilai tersebut tidak muncul dari refleksi filosofis modern, melainkan dari tradisi budaya lokal. Alam sebagai titipan leluhur menciptakan relasi moral yang kuat: merusak alam berarti merusak kehormatan warisan kolektif. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal dapat menghasilkan orientasi ekosentris tanpa melalui diskursus akademik Barat.

Narasi tentang “anak cucu” yang muncul dalam wawancara partisipan mencerminkan prinsip keadilan antar-generasi (*intergenerational justice*). Konsep ini telah lama dibahas dalam teori keadilan oleh Rawls (1971), yang menyatakan bahwa keadilan harus mempertimbangkan hak generasi mendatang. Dalam konteks lingkungan, prinsip ini diperluas oleh Weiss (1989) yang menekankan kewajiban moral untuk menjaga kualitas lingkungan bagi generasi masa depan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *intergenerational justice* telah terinternalisasi dalam nilai budaya lokal. Pelaku UMKM memandang diri mereka sebagai penjaga sementara (*temporary custodians*) dari alam yang diwariskan. Perspektif ini membentuk orientasi keberlanjutan yang bersifat jangka panjang, bukan oportunistik. Dengan demikian, praktik kewirausahaan hijau yang mereka jalankan bukan sekadar adaptasi terhadap tren global SDGs, tetapi refleksi dari tanggung jawab moral lintas generasi yang telah lama hidup dalam budaya.

Dalam teori *Common-Pool Resources* yang dikembangkan oleh Ostrom (1990), pengelolaan sumber daya bersama dapat berhasil ketika komunitas memiliki norma kolektif yang kuat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai “alam sebagai titipan leluhur” berfungsi sebagai norma kolektif yang memperkuat tata kelola sumber daya

bersama. Laut, sungai, dan tambak di Pangkep dapat dipahami sebagai commons yang rentan terhadap *over-exploitation*. Namun, keberadaan norma budaya yang memaknai alam sebagai warisan sakral menciptakan batas moral terhadap eksploitasi. Ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola berbasis budaya dapat menjadi alternatif efektif terhadap model pengelolaan berbasis negara atau pasar semata. Temuan ini memperluas teori Ostrom dengan menunjukkan bahwa norma spiritual dan simbolik juga berperan dalam menjaga keberlanjutan *commons*.

Jika pada Tema 1 *Siri'* diposisikan sebagai tekanan normatif, maka pada Tema 3 dimensi spiritualitas menambahkan pilar kognitif dalam *Institutional Theory* (Scott, 2014). Alam sebagai titipan leluhur membentuk kerangka makna (meaning system) yang memengaruhi cara pelaku usaha memahami realitas ekologis. Dalam pilar kognitif institusional, tindakan dianggap sah ketika selaras dengan skema makna yang diterima bersama. Dalam konteks ini, menjaga alam menjadi tindakan yang "*taken for granted*" sebagai kewajiban moral. Pelanggaran terhadapnya bukan hanya deviasi perilaku, tetapi deviasi ontologis, bertentangan dengan cara komunitas memahami dunia. Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan dalam konteks Pangkep tidak hanya dijaga oleh norma (*Siri'*) atau empati (*Pacce*), tetapi juga oleh kerangka makna spiritual yang menempatkan alam sebagai entitas bermartabat.

Literatur *Indigenous Entrepreneurship* menekankan pentingnya hubungan spiritual antara komunitas adat dan tanah (Anderson et al., 2006). Dalam banyak komunitas adat, tanah tidak sekadar aset ekonomi, tetapi bagian dari identitas kolektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pola serupa terjadi dalam konteks Bugis-Makassar. Alam sebagai titipan leluhur membentuk orientasi bisnis yang berbasis keberlanjutan jangka panjang. Hal ini memperluas literatur *Indigenous Entrepreneurship* dengan menunjukkan bahwa spiritualitas lokal bukan hanya sumber identitas simbolik, tetapi juga fondasi ontologis praktik kewirausahaan hijau. Dengan kata lain, inovasi hijau di Pangkep tidak dipahami sebagai adopsi modernisasi ekologis, tetapi sebagai kontinuitas nilai leluhur dalam konteks ekonomi kontemporer.

Dengan demikian, jika *Siri'* berfungsi sebagai mekanisme kontrol normatif dan *Pacce* sebagai aktivator empati ekologis, maka Tema 3 menunjukkan dimensi ontologis yang memberikan makna mendalam terhadap keberlanjutan. *Siri'*, *Pacce*, dan Alam sebagai Titipan Leluhr membentuk arsitektur etika kewirausahaan hijau yang komprehensif dan kontekstual dalam masyarakat Bugis-Makassar.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewirausahaan hijau pada UMKM di Kabupaten Pangkep tidak dapat dipahami semata melalui kerangka rasional-ekonomis atau tekanan regulasi formal sebagaimana dominan dalam literatur Barat. Melalui pendekatan fenomenologis, studi ini mengungkap bahwa praktik bisnis ramah lingkungan berakar pada arsitektur nilai budaya Bugis-Makassar, khususnya *Siri' na Pacce* serta pemaknaan alam sebagai titipan leluhur. Ketiga dimensi tersebut membentuk sistem etika ekologis yang terintegrasi dan bekerja secara simultan dalam membentuk perilaku kewirausahaan hijau. Pertama, *Siri'* berfungsi sebagai institusi moral normatif yang bekerja sebagai mekanisme regulasi diri dan regulasi sosial kolektif. Nilai ini menciptakan tekanan normatif yang kuat (*normative institutional pressure*) sehingga tindakan mencemari lingkungan dipersepsikan sebagai kehilangan kehormatan sosial (*mate siri'*). Dengan demikian, keberlanjutan lingkungan dijaga bukan terutama karena kepatuhan terhadap regulasi negara, tetapi karena kebutuhan mempertahankan legitimasi moral dalam komunitas. Temuan ini memperluas *Institutional Theory* dengan menunjukkan bahwa institusi informal berbasis budaya dapat berperan dominan dalam membentuk perilaku organisasi kecil di konteks masyarakat komunal. Kedua, *Pacce* berfungsi sebagai aktivator empati ekologis yang mendorong tindakan proaktif. Solidaritas yang semula dipahami sebagai empati antar-manusia meluas menjadi solidaritas lintas-spesies. Lingkungan diposisikan sebagai bagian dari komunitas moral yang layak dipedulikan. Dimensi ini memperkaya literatur *green entrepreneurship* dengan menunjukkan bahwa inovasi hijau dapat didorong oleh motivasi prososial berbasis emosi moral kolektif, bukan semata oleh peluang pasar atau tekanan regulatif. Dalam perspektif teoritis, *Pacce* dapat dipahami sebagai bentuk *affective social capital* yang mengaktifkan perilaku ekologis melalui empati dan rasa tanggung jawab bersama. Ketiga, pemaknaan alam sebagai titipan leluhur menghadirkan fondasi ontologis dan intergenerasional bagi praktik keberlanjutan. Alam tidak direduksi menjadi sumber daya ekonomi, melainkan dipahami sebagai warisan sakral yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Perspektif ini mencerminkan prinsip keadilan antar-generasi (*intergenerational justice*) dan memperkuat tata kelola sumber daya bersama (*commons*) melalui norma spiritual kolektif. Dimensi ini menegaskan bahwa kewirausahaan hijau di Pangkep berakar pada relasi ontologis manusia–alam yang bersifat relasional dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi teoretis utama. Pertama, memperluas literatur *green entrepreneurship* dengan memasukkan dimensi etika kultural sebagai determinan sentral perilaku ekologis. Kedua, memperkaya *Institutional Theory* dengan menunjukkan peran dominan institusi informal dalam tata kelola lingkungan di konteks masyarakat komunal. Ketiga, mengembangkan konsep *ecological social capital* dan *affective moral driver* dalam kerangka *Indigenous Entrepreneurship*. Secara praktis, temuan ini

menunjukkan bahwa kebijakan promosi kewirausahaan hijau di wilayah berkembang sebaiknya tidak hanya berbasis insentif ekonomi atau regulasi administratif. Pendekatan berbasis budaya yang mengintegrasikan nilai kehormatan, solidaritas, dan tanggung jawab lintas generasi, berpotensi menghasilkan internalisasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abbas, A. (2018). Siri' na Pacce culture in the perspective of Islamic business ethics. *Journal of Islamic Marketing*, 9(3), 630–642.
- Anderson, R. B., Dana, L. P., & Dana, T. E. (2006). Indigenous land rights, entrepreneurship, and economic development in Canada: “Opting-in” to the global economy. *Journal of World Business*, 41(1), 45–55.
- Aquino, K., & Reed, A. (2002). The self-importance of moral identity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 83(6), 1423–1440.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dana, L. P., Gurau, C., Light, I., & Ramadani, V. (2022). Family, community, and ethnic capital as entrepreneurial resources: Toward an integrated theory. *Journal of Small Business Management*, 60(4), 883–912.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the environment*. Oxford University Press.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Gast, J., Gundolf, K., & Cesinger, B. (2017). Doing business in a green way: A systematic review of the ecological sustainability orientation literature. *Journal of Cleaner Production*, 147, 44–56.
- Grant, A. M. (2007). Relational job design and the motivation to make a prosocial difference. *Academy of Management Review*, 32(2), 393–417.
- Haldar, A. (2019). Green entrepreneurship in the renewable energy sector – a case study of Gujarat. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 10(1), 234–250.
- Haris, H. (2021). The value of siri'na pacce in the implementation of village government in Gowa Regency, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 58-71.
- Hoffman, M. L. (2000). *Empathy and moral development: Implications for caring and justice*. Cambridge University Press.
- Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement: A summary. *Inquiry*, 16(1–4), 95–100.
- Noon, E. J. (2018). Interpretative phenomenological analysis: An appropriate methodology for educational research. *Journal of Perspectives in Applied Academic Practice*, 6(1), 75-83.
- OECD. (2021). *No net zero without SMEs: Exploring the key issues for greening SMEs and green entrepreneurship*. OECD SME and Entrepreneurship Papers, No. 30. OECD Publishing.

- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahman, Z., Mansyur, A. Y., & Pono, M. (2020). The effect of Siri' na Pacce culture on employee performance at the Department of Population and Civil Registration of Makassar City. *Hasanuddin Journal of Business Strategy*, 2(1), 74-84.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rolston, H. (1988). *Environmental ethics: Duties to and values in the natural world*. Temple University Press.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). Sage Publications.
- Scott, J. C. (1976). *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Smith, J. A., Flowers, P., & Larkin, M. (2022). *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research* (2nd ed.). Sage.
- Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. *Academy of Management Review*, 25(1), 217–226.
- Singer, P. (1981). *The expanding circle: Ethics and sociobiology*. Princeton University Press.
- Soewarno, N., Tjahjadi, B., & Fithrianti, F. (2019). Green innovation strategy and green innovation: The roles of green organizational identity and environmental organizational legitimacy. *Management Decision*, 57(11), 3061–3078.
- Thompson, E. P. (1971). The moral economy of the English crowd in the eighteenth century. *Past & Present*, 50(1), 76–136.
- Weiss, E. B. (1989). *In fairness to future generations: International law, common patrimony, and intergenerational equity*. United Nations University.
- Yi, G. (2021). From green entrepreneurial intentions to green entrepreneurial behaviors: The role of university entrepreneurial support and external institutional support. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 17, 963–979.